

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Kemandirian Daerah dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera

Selly Novanda Sari¹, Firmansyah², Siska Aprianti³
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia
sellynovandasari@gmail.com, firmansyahica2@gmail.com,
siskaaprianti@polsri.ac.id

ABSTRACT

Disclosures that must be made in the regional government financial report are mandatory to create a transparent and accountable government, the purpose of this study is to determine the effect of Regional Government Size, Regional Wealth, Regional Independence and Level of Regional Government Dependence on the Level of Disclosure of Regional Government Financial Reports partially and simultaneously in the Regional Government of Sumatra Island in 2021-2023. The type of data used in this study is secondary data obtained from the LKPD data of the Province in Sumatra Island for the period 2021-2023 which is sourced from the official website of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The population in this study was 10 Provinces in Sumatra Island and used saturated samples. The data analysis technique used for this study was multiple linear regression analysis using IBM SPSS Version 25. The results of the study showed that the Size of the Regional Government had a positive and significant effect on the Level of Disclosure of LKPD, Regional Independence and Level of Dependence of the Regional Government had a negative and significant effect on the Level of Disclosure of LKPD, while Regional Wealth had no effect and was not significant on the Level of Disclosure of LKPD.

Keywords: *Disclosure; Government; Size; Wealth; Independence; Depend*

ABSTRAK

Pengungkapan yang harus dilakukan pada laporan keuangan pemerintah daerah ialah hal yang wajib untuk menciptakan pemerintahan yang transparansi serta akuntabel, adapun tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Kemandirian Daerah serta Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dihadapkan dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara parsial serta simultan di Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2021 sampai 2023. Jenis data yang dipergunakan di penelitian ini yakni data berkategori sekunder diperoleh dari data LKPD Provinsi di Pulau Sumatera periode 2021-2023 yang secara sumber dari *website* resmi yang dipunyai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Populasi di penelitian ini sebanyak 10 Provinsi yang adanya di Pulau Sumatera serta mempergunakan sampel jenuh. Teknik analisis data yang dipergunakan untuk penelitian ini yakni analisis regresi linear berganda mempergunakan IBM SPSS Versi 25. Hasil pelaksanaan penelitian mengungkap bahwa Ukuran Pemerintah Daerah memberi pengaruh yang secara nilai positif serta signifikan dihadapkan dengan Tingkat Pengungkapan LKPD, Kemandirian Daerah serta Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah memberi pengaruh yang secara nilai negatif serta signifikan dihadapkan dengan Tingkat Pengungkapan

LKPD, sedangkan Kekayaan Daerah tidak memberi pengaruh signifikan dihadapkan dengan Tingkat Pengungkapan LKPD.

Kata Kunci: Pengungkapan; Pemerintahan; Ukuran; Kekayaan; Kemandirian; Ketergantungan

PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk merealisasikan transparansi serta akuntabilitas dari pengelolaan keuangan di tingkatan daerah, pemerintah daerah diberi kewajiban untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah yang menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban. Didasarkan dengan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masing-masing pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota wajib menyusun laporan keuangan. Sementara dari hal itu, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 32 Ayat (1) lebih lanjut mengatur bahwa penyusunan laporan keuangan, baik dalam bentuk maupun isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. Hal tersebut searah dengan yang termaktub di dalam UU Keuangan Negara, Pemerintah melaksanakan penetapan SAP melalui “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010”. Diturutkan dengan “PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan berfungsi sebagai wujud akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara”. Komponen dari laporan keuangan pokok mencakup sejumlah hal yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengguna laporan keuangan perlu adanya pengungkapan dengan cara lengkap untuk memahami informasi yang adanya di laporan keuangan. Informasi dalam CaLK dilakukan untuk memudahkan pemahaman keseluruhan laporan. Pengungkapan dalam laporan keuangan penting karena mengikuti standar akuntansi yang diatur oleh “PP No. 71 Tahun 2010”. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang dilakukan penyajian memenuhi persyaratan resmi.

Setiap tahun, pemerintah daerah melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan sumber daya. LKPD mendukung pengambilan keputusan, perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. LKPD kemudian dilaksanakan pengauditan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai kepatuhan dihadapkan dengan standar akuntansi, keandalan informasi keuangan dan kewajaran pengungkapan. Selain memenuhi kewajiban hukum, LKPD merupakan alat untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi yang adanya di Pulau Sumatera tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya dari tahun 2019 senilai 19,21% dan menaik di tahun 2020 sebesar 20,16%, pada tahun 2021 mengalami penurunan senilai 19,88% lalu pada tahun 2022

mengalami kenaikan senilai 20,00% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi senilai 19,90%.

Didasarkan dengan “PP Nomor 71 Tahun 2010”, Tingkat Pengungkapan LKPD menunjukkan bahwa jika tingkat pengungkapan mengalami kenaikan artinya laporan keuangan tersebut semakin lengkap, transparan serata searah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut semakin memenuhi kewajiban pengungkapannya, sehingga laporan keuangannya lebih informatif dan akuntabel. Sebaliknya jika tingkat pengungkapan mengalami penurunan hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dalam menyajikan informasi penting sesuai dengan SAP. Terdapat kemungkinan bahwa beberapa informasi wajib belum diungkap atau pengungkapannya masih belum memadai, sehingga dapat mengurangi keandalan laporan keuangan tersebut.

Ukuran pemerintah memberi gambaran besar atau juga kecilnya pemerintah bisa dilihat melalui keseluruhan total aset yang dipunyai. Total aset yang secara nilai semakin besar, maka ukuran pemerintah pun secara nilai semakin besar. Ukuran pemerintah yang secara nilai besar akan memberi dorongan pada pemerintah di tingkatan daerah untuk mengungkap informasi berupa keuangan dengan cara lengkap. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dengan aset yang secara nilai besar mempunyai beragam item penyusun aset seperti aset tetap atau juga aset lancar yang secara jumlah lebih banyak, hal tersebut memberi dorongan pengungkapan yang secara cakupan lebih luas (Uliarta dkk, 2018).

Pemerintah daerah mempertanggungjawabkan besaran hasil kekayaan yang dipunyai daerah serta banyaknya jumlah sumber daya dilakukan penerimaan dengan memberi peningkatan pengungkapan informasi di aspek finansialnya dengan cara lebih baik. Kekayaan daerah yang secara nilai tinggi memberi petunjuk kinerja yang dipunyai daerah tersebut pun bernilai semakin baik. Hal ini akan memberi dorongan pada penyajian informasi yang secara jumlah semakin banyak. Informasi tersebut ialah hal wajib yang harus dilakukan penyampaian oleh pemerintah di tingkatan daerah kepada para pihak yang menjadi *stakeholder* melalui LKPD. Diturutkan dengan pendapat Salfadhilah dkk, (2021) jika kekayaan daerah secara nilai semakin besar, maka sumber daya yang dipunyai untuk melaksanakan pengungkapan pun bernilai semakin besar, hal ini memberi dampak pada kekayaan daerah serta pengungkapan di laporan keuangan mengalami adanya peningkatan.

Suatu daerah mempunyai kemandirian fiskal yang secara nilai tinggi, pejabat publik akan merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat lokal yang menjadi sumber utama pendapatan daerah. Rasa tanggung jawab ini memberi dorongan pemerintah di tingkatan daerah untuk menyusun laporan keuangan secara transparan, mengungkapkan informasi keuangan secara lebih lengkap dan menjaga kepercayaan publik melalui pelaporan yang akuntabel. Dengan hal tersebut, semakin tinggi kemandirian daerah, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan LKPD-nya, sebab pejabat publik bertindak sebagai *steward* yang ingin menunjukkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah ditunjukkannya oleh besar atau juga kecilnya pendapatan daerah. Hal ini secara arti memberi petunjuk bahwa jika tingkat ketergantungan secara nilai semakin besar, maka pengungkapan yang dilaksanakan pemerintah daerah pun bernilai semakin besar (Waliyyani dan Mahmud, 2017). Searah dengan pengukuran di penelitian Laswad dkk, (2005) dalam Anggara dan Cheisviyanny (2020) Ukuran Pemerintah Daerah di penelitian ini dinilai dari aset yang dimana memberi pengaruh yang secara nilai positif dihadapkan dengan Tingkat Pengungkapan dalam LKPD. Kemudian hasil penelitian menurut Kurniawati dkk, (2020) Kekayaan Daerah memberi pengaruh yang secara nilai positif serta signifikan dihadapkan dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian kaitannya dengan Kemandirian Daerah juga dilaksanakan oleh Finakesti dkk, (2022) yang menyatakan bahwa rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah mempengaruhi Pengungkapan dalam LKPD secara signifikan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Maryono (2022) memberi pernyataan bahwa Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah memberi pengaruh yang secara nilai positif serta signifikan dihadapkan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Keterbatasan penelitian yang searah dengan topik pengungkapan laporan keuangan di cakupan sektor pemerintahan serta keterbatasan akses publik dihadapkan dengan informasi serta data pemerintah dengan cara bebas serta cenderung rahasia membuat penelitian ini menarik untuk dilaksanakan penelitian kembali. Temuan riset terdahulu yang bersifat tidak konsisten kaitannya dengan faktor pendorong pemerintah daerah mengungkap bahwa laporan keuangan pemerintah daerah pun sifatnya menjadi semakin menarik untuk dilaksanakan penelitian dengan cara lebih lanjut.

Teori *Stewardship*

Grand theory yang menjadi dasar di penelitian ini yakni *stewardship theory* Donaldson & Davis (1991) teori ini diberi dukungan oleh penelitian Raharjo (2007), memberi gambaran suatu situasi di mana para pihak yang menjadi manajemen tidak termotivasi oleh sejumlah tujuan individu, tetapi ditunjukkannya lebih kepada sasaran hasil utama mereka, yakni peruntukannya bagi kepentingan organisasi. Teori tersebut memberi asumsi bahwa ditemukan hubungan yang secara nilai kuat antara kepuasan serta kesuksesan organisasi. Di cakupan sektor publik, *Steward* ialah pemerintah daerah yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengungkapan dengan melakukan penyusunan laporan keuangan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban atas beragam sumber daya yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Laporan keuangan yang dimiliki pemerintah daerah ini pun ialah salah satu dari wujud pelaksanaan prinsip "*Good Public Governance*" (Najah dan Purwati, 2019).

Pemerintah yang perannya menjadi pihak dengan informasi melimpah serta bertanggungjawab atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan, mempunyai suatu kesadaran untuk tegas dalam merealisasikan transparansi serta akuntabilitas. Kedua hal tersebut bisa direalisasikan di antaranya yakni melalui kualitas penyajian yang bernilai baik serta

pengungkapan informasi bersifat lengkap di laporan keuangan searah dengan standar akuntansi pemerintahan (Astuti dkk, 2022).

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Ukuran pemerintah daerah memberi petunjuk besar kecilnya pemerintahan. Berdasarkan teori *stewardship*, pejabat pada daerah yang lebih besar akan terdorong untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas melalui tingkat pengungkapan informasi keuangan yang lebih tinggi. Hal ini dilaksanakan demi menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan dengan baik. Dengan hal tersebut, ukuran pemerintah memberi gambaran besar atau juga kecilnya pemerintah bisa dilihat melalui keseluruhan aset yang dipunyai. Jika total aset yang secara nilai semakin besar, maka ukuran pemerintahan tersebut pun bernilai semakin besar. Ukuran pemerintahan yang berkategori besar akan memberi dorongan pada pemerintahan di tingkatan daerah untuk mengungkap informasi keuangan dengan cara lengkap, hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang asetnya bernilai besar, mempunyai beragam item penyusun seperti aset tetap atau juga aset lancar yang secara jumlah lebih banyak. Hal tersebut memberi dampak para dorongan pengungkapan yang cakupannya lebih luas (Uliarta dkk, 2018).

H1: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Pendapatan daerah ialah sejumlah uang yang diterima oleh rekening kasa umum daerah, penambahan tersebut memberi akibat bertambahnya ekuitas dana di rentang 1 tahu anggaran, yang mana daerah tidak perlu melaksanakan pengembalian atas dana yang diterima tersebut. Keseluruhan penghasilan, baik bentuknya berupa pajak daerah atau juga retribusi daerah diterimanya dari masyarakat. Maka dari hal itu, jika dilihat mempergunakan teori "*stewardship*", maka sudah layak pemerintah daerah mempertanggungjawabkan besaran hasil kekayaan daerah serta banyaknya sumber daya yang diterima dengan memberi peningkatan pengungkapan informasi di aspek finansialnya dengan cara lebih baik. Kekayaan daerah yang secara nilai tinggi memberi petunjuk bahwa kinerja yang dipunyai daerah tersebut secara nilai semakin baik. Hal ini akan memberi dorongan informasi yang sampainya oleh pemerintah daerah kepada para *stakeholders* pun semakin banyak. Informasi tersebut dilakukan penyajian melalui LKPD.

H2: Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Kemandirian daerah memberi gambaran kemampuan yang dipunyai pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada cakupan masyarakat yang sudah melaksanakan pelunasan pajak serta retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah. Kemandirian dari suatu daerah bisa dilihat melalui perbandingan antara dua hal, yakni pendapatan asli daerah serta total pendapatan daerah (Wardani dan Ariani, 2022). Sehingga jika dilihat mempergunakan teori *stewardship*, ketika suatu daerah

mempunyai kemandirian fiskal yang secara nilai tinggi, pejabat publik akan merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat lokal yang menjadi sumber utama pendapatan daerah. Rasa tanggung jawab ini memberi dorongan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan secara transparan, mengungkapkan informasi keuangan secara lebih lengkap dan menjaga kepercayaan publik melalui pelaporan yang akuntabel. Dengan hal tersebut, jika kemandirian daerah secara nilai semakin tinggi, maka tingkat pengungkapan LKPD-nya pun bernilai semakin tinggi, sebab pejabat publik bertindak sebagai *steward* yang ingin menunjukkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.

H3: Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Tingkat ketergantungan ialah seberapa besar pemerintah daerah melaksanakan program kerja yang sudah dilakukan perancangan serta diberi bantuan oleh pemerintah di tingkatan pusat. Pemerintah pusat atau di tingkatan provinsi akan meminta suatu pengungkapan bersifat lebih sebagai upaya untuk melakukan pengawasan kinerja yang dimiliki pemerintah daerah atas penggunaan dana yang didapat. Tingkat ketergantungan daerah ditunjukkannya melalui besar atau kecilnya pendapatan daerah (Waliyyani dan Mahmud, 2017). Pertanggungjawaban melalui dua hal, yakni transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bisa memberi pengurangan asimetri informasi, dengan hal tersebut kepercayaan publik baik kepada cakupan masyarakat atau pemerintah pusat serta di tingkatan provinsi bahwa dana tersebut tidak disalahgunakan dan dana tersebut pun ialah bentuk dari kesadaran pemerintah di tingkatan daerah dalam melaksanakan perannya (Setiawan dan Maryono, 2022).

H4: Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai jenis data yang digunakan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dengan sumber berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera untuk periode 2019 hingga 2023 yang bersumber dari BPK RI. Seluruh pemerintah Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, sebanyak 10 Provinsi, dijadikan sebagai populasi di penelitian ini. Teknik sampling yang dipergunakan yakni sampling jenuh, di mana seluruh elemen populasi dijadikan sebagai sampel, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera selama lima tahun, sehingga menghasilkan total sebanyak 50 sampel. Analisis di penelitian ini dilaksanakan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Version 25 Statistical Program and Service Solution.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sumber: *Output SPSS Version 25, 2025*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemerintah Daerah	50	29,13	31,21	30,2266	,69194
Kekayaan Daerah	50	27,25	29,61	28,4930	,64813
Kemandirian Daerah	50	4,12	143,37	68,5976	31,53548
Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	50	23,21	67,71	53,1910	11,75859
Tingkat Pengungkapan LKPD	50	51,53	65,64	59,3138	2,91859
Valid N (listwise)	50				

Didasarkan dengan hasil analisis statistik deskriptif, Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi di Pulau Sumatera mempunyai nilai minimum yang besarnya 51,53% sedangkan nilai maksimum besarnya 65,64%. Nilai rata-rata yang besarnya 59,31 atau setara dengan persentase yang besarnya 59% dan nilai standar deviasi yang didapat dengan besaran 2,91. Hal ini memberi petunjuk bahwa Tingkat Pengungkapan dalam LKPD Provinsi di Pulau Sumatera tergolong tinggi, namun belum sepenuhnya memaksimalkan Pengungkapan LKPD yang telah ditentukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk Ukuran Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera mempunyai nilai minimum yang besarnya 29,13 sedangkan nilai maksimum besarnya 31,21. Nilai rata-rata besarnya 30,22 atau setara dengan persentase yang besarnya 30% serta didapat juga standar deviasi yang besarnya 0,69. Untuk Kekayaan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera mempunyai nilai minimum yang besarnya 27,25 sedangkan nilai maksimum besarnya 29,61. Nilai rata-rata yakni 28,49 atau setara dengan persentase yang besarnya 28% didapat juga standar deviasi sebesar 0,64. Sementara itu, Kemandirian Daerah Provinsi di Pulau Sumatera mempunyai nilai minimum yang besarnya 4,12, hal ini memberi petunjuk bahwa kemampuan pemerintah untuk melaksanakan pendanaan sendiri kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta pembangunan masih sangat rendah. Sedangkan nilai maksimum sebesar 143,37. Nilai rata-rata yakni 68,59 atau setara dengan persentase yang besarnya 69%, hal ini memberi petunjuk bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Provinsi di Pulau Sumatera tergolong sedang atau bersifat partisipatif. Nilai standar deviasi Kemandirian Daerah sebesar 31,53. Untuk Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera mempunyai nilai minimum yang besarnya 23,21 sedangkan nilai maksimum besarnya 67,71. Nilai rata-rata yakni 53,19 atau

serta dengan persentase yang besarnya 53%, hal ini memberi petunjuk bahwa Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera tergolong sedang atau bersifat delegatif. Nilai standar deviasi Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah sebesar 11,75.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Sumber: *Output SPSS Version 25, 2025*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,13338818
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,054
	Negative	-,089
Test Statistic		,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Pengujian ini melaksanakan penerapan metode Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan data akan dinyatakan berkategori normal jika nilai signifikansi besarnya > 0,05. Didasarkan dengan hasil uji di atas, didapat nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) yang besarnya 0,200. Sehingga bisa dilakukan penyimpulan bahwa dari hasil pengujian ini data yang dipergunakan distribusinya berkategori normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikoliniearitas

Sumber: *Output SPSS Version 25, 2025*

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Ukuran Pemerintah Daerah	,193	5,178
	Kekayaan Daerah	,143	7,010
	Kemandirian Daerah	,422	2,368
	Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	,700	1,428
a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan LKPD			

Didasarkan dengan penjabaran tabel di atas, didapat nilai *tolerance* untuk Ukuran Pemerintah Daerah yang besarnya 0,193 > 0,10 serta VIF yang besarnya

5,178 < 10. Nilai *tolerance* untuk Kekayaan Daerah besarnya 0,143 > 0,10 serta VIF besarnya 7,010 < 10. Nilai *tolerance* untuk Kemandirian Daerah didapatkan dengan besaran 0,422 > 0,10 serta VIF besarnya 2,368 < 10. Nilai *tolerance* untuk Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah sebesar 0,700 > 0,10 dan VIF sebesar 1,428 < 10. Keseluruhan variabel memberi petunjuk bahwa nilai *tolerance* > 0,10 serta memberi petunjuk nilai VIF < 10. Sehingga bisa dijelaskan bahwa dari hasil pengujian ini tidak ada multikolinearitas antar variabel independen di model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: *Output SPSS Version 25, 2025*

		Correlations				
		Ukuran Pemerintah Daerah	Kekayaan Daerah	Kemandirian Daerah	Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Ukuran Pemerintah Daerah	Correlation Coefficient	1,000	,860**	,348*	-,579**
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,013	,000
		N	50	50	50	50
Kekayaan Daerah		Correlation Coefficient	,860**	1,000	,667**	-,546**
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,000
		N	50	50	50	50
Kemandirian Daerah		Correlation Coefficient	,348*	,667**	1,000	-,294*
		Sig. (2-tailed)	,013	,000	.	,038
		N	50	50	50	50
Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah		Correlation Coefficient	-,579**	-,546**	-,294*	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	,038	.
		N	50	50	50	50
Unstandardized Residual		Correlation Coefficient	,068	,020	,065	-,040
		Sig. (2-tailed)	,638	,890	,655	,781
		N	50	50	50	50

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Didasarkan dengan penjabaran tabel 4, diketahui bahwasanya nilai signifikansi (*Sig. 2-tailed*) pada kolom *unstandardized residual* dari variabel Ukuran Pemerintah Daerah besarnya 0,638, variabel Kekayaan Daerah besarnya 0,890, variabel Kemandirian Daerah besarnya 0,655 serta variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah yang besarnya 0,781. Dapat dijelaskan bahwa keseluruhan variabel memberi petunjuk nilai signifikansi (*Sig. 2-tailed*) lebih dari 0,05, sehingga bisa dilakukan penyimpulan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam data tersebut.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi
 Sumber: *Output SPSS Version 25, 2025*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,952 ^a	,906	,898	,668	1,780

a. Predictors: (Constant), Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah

b. Dependent Variable: Y1

Didasarkan dengan penjabaran tabel di atas, hasil pengujian autokorelasi mengungkap bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) untuk hipotesis besarnya 1,780. Kriteria data dilakukan penyebutan lolos uji *Durbin-Watson* jika $dU < DW < 4 - dU$. Dari hasil pelaksanaan penelitian ini didapatkan hasil $1,7214 < 1,780 < 2,2786$, sehingga hasil di penelitian ini dilakukan penyebutan tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Pengujian Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Sumber: *Output SPSS Version 25, 2025*

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-.951	6,056		-.157	,876		
	Ukuran Pemerintah Daerah	2,795	,314	,924	8,907	,000	,193	5,178
	Kekayaan Daerah	-.720	,390	-.223	-1,848	,071	,143	7,010
	Kemandirian Daerah	-.010	,005	-.146	-2,076	,044	,422	2,368
	Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	-.057	,010	-.320	-5,875	,000	,700	1,428

a. Dependent Variable: Y1

Persamaan regresi linear berganda menjelaskan nilai konstanta (α) memiliki nilai yang besarnya -0,951 angka tersebut memberi petunjuk bahwa variabel independen dianggap konstan, maka nilai Tingkat Pengungkapan LKPD di Pulau Sumatera sebesar -0,951 atau -0,95%. Nilai koefisien Ukuran Pemerintah Daerah (X1) senilai 2,795 artinya setiap peningkatan 1% variabel tersebut, maka akan meningkatkan Pengungkapan LKPD sebesar 2,795. Kekayaan Daerah (X2) menunjukkan setiap peningkatan 1% variabel tersebut maka Tingkat Pengungkapan LKPD akan mengalami adanya penurunan dengan besaran -0,720. Kemandirian Daerah (X3) menunjukkan setiap peningkatan 1% variabel tersebut maka Tingkat Pengungkapan LKPD akan mengalami adanya penurunan dengan besaran -0,010. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (X4) menunjukkan setiap peningkatan 1% variabel tersebut maka Tingkat Pengungkapan LKPD akan menurun dengan besaran -0,057.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) secara fungsi menjadi indikator untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menggambarkan variasi yang terjadinya di variabel dependen. Nilai R^2 kisarannya di rentang angka 0 - 1. Jika R^2 secara nilai rendah, hal tersebut memberi indikasi bahwa variabel independen hanya menjabarkan sebagian kecil dari variasi variabel dependen. Hal yang sebaliknya pun berlaku, jika R^2 secara nilai mendekati 1, hal tersebut memberi petunjuk bahwa variabel independen mampu menjabarkan hampir keseluruhan variasi dari variabel dependen di model yang dipergunakan.

Tabel 7. Hasil Uji R²

Sumber: *Output SPSS Version 25, 2025*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,952 ^a	,906	,898	,668	1,780

a. Predictors: (Constant), Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah

b. Dependent Variable: Y1

Hasil tabel di atas menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi senilai 0,898 hal ini memberi petunjuk bahwa keseluruhan variabel independen memberikan pengaruhnya terhadap variabel dependen dengan persentase yang besarnya 89,8%, sedangkan 10,2% sisanya diberi pengaruh oleh berbagai faktor lain yang tidak terdapat pada variabel penelitian ini.

Uji Simultan (Uji Statistik f)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (F)

Sumber: *Output SPSS Version 25, 2025*

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	194,375	4	48,594	108,947	,000 ^b
	Residual	20,071	45	,446		
	Total	214,447	49			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan nilai f-hitung yang besarnya 108,947 dengan signifikansi 0,000. Hal ini secara arti f-hitung $108,947 > f\text{-tabel } 2,58$ dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka bisa dilakukan penyimpulan bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Kemandirian Daerah serta Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dengan cara simultan memberi pengaruh bernilai signifikan dihadapkan pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (t)
 Sumber: *Output SPSS Version 25, 2025*

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-.951	6,056		-.157	,876		
	Ukuran Pemerintah Daerah	2,795	,314	,924	8,907	,000	,193	5,178
	Kekayaan Daerah	-.720	,390	-.223	-1,848	,071	,143	7,010
	Kemandirian Daerah	-.010	,005	-.146	-2,076	,044	,422	2,368
	Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	-.057	,010	-.320	-5,875	,000	,700	1,428

a. Dependent Variable: Y1

Hasil pengujian untuk uji t berdasarkan tabel 9, maka dihasilkan variabel Ukuran Pemerintah Daerah memiliki t-hitung sebesar 8,907 > t-tabel 2,014 serta nilai signifikansi yang besarnya 0,000 < 0,05, hal ini memberi petunjuk bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah mempunyai suatu pengaruh yang bernilai positif serta signifikan dihadapkan pada Tingkat Pengungkapan LKPD. Variabel Kekayaan Daerah mempunyai t-hitung yang besarnya -1,848 < t-tabel 2,014 serta nilai signifikansi yang besarnya 0,071 > 0,05, hal ini memberi petunjuk bahwa variabel Kekayaan Daerah tidak mempunyai suatu pengaruh serta tidak signifikan dihadapkan pada Tingkat Pengungkapan LKPD. Variabel Kemandirian Daerah mempunyai t-hitung yang besarnya -2,076 > t-tabel 2,014 dan nilai signifikansi yang besarnya 0,044 < 0,05, hal ini memberi petunjuk bahwa variabel Kemandirian Daerah mempunyai suatu pengaruh bernilai negatif serta signifikan dihadapkan pada Tingkat Pengungkapan LKPD. Variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah mempunyai t-hitung yang besarnya -5,875 > t-tabel 2,014 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, hal ini memberi petunjuk bahwa variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh yang secara nilai negatif serta signifikan dihadapkan pada Tingkat Pengungkapan LKPD.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Hasil penelitian memberi petunjuk bahwasanya Ukuran Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh bernilai positif serta signifikan dihadapkan pada Tingkat Pengungkapan LKPD. Hasil pelaksanaan penelitian tersebut memberi petunjuk bahwa Ukuran Pemda yang diukur melalui Total Aset Daerah yang tinggi dapat meningkatkan pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan LKPD yang sifatnya sesuai dengan SAP. hal ini dikarenakan pemerintah daerah dengan aset yang besar mempunyai beragam item penyusun aset seperti aset tetap atau juga aset lancar yang secara jumlah lebih banyak, sehingga mendorong pengungkapan yang lebih luas (Uliarta dkk, 2018). Faktor ini searah dengan teori *stewardship* yang memberi

pernyataan pemerintah daerah akan terus mempertanggungjawabkan pengungkapan dengan baik pada laporan keuangan melalui Ukuran Pemda. Total Aset Daerah yang tinggi akan semakin berkualitas jika dikelola sesuai kriteria yang ditetapkan, oleh karena itu adanya peningkatan pengungkapan di dalam Ukuran Pemda yang tinggi diharapkan mampu untuk mengurangi kecurangan informasi yang dilakukan penyajian di laporan keuangan antara pemerintah dan rakyatnya. Hasil pelaksanaan penelitian ini searah dengan penelitian yang dilaksanakannya oleh Laswad dkk, (2005) dalam Anggara dan Cheisviyanny (2020) yang memberi petunjuk bahwa Ukuran Pemerintah Daerah yang dinilai melalui Total Aset mempunyai pengaruh yang secara nilai positif dihadapkan pada Tingkat Pengungkapan dalam LKPD.

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Hasil penelitian memberi petunjuk bahwasanya Kekayaan Daerah tidak memiliki pengaruh serta tidak signifikan dihadapkan pada Tingkat Pengungkapan LKPD. Hasil penelitian tersebut menjabarkan bahwa Kekayaan Daerah yang dilihat dari Total PAD yang tinggi ternyata tidak secara signifikan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan secara lebih baik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Faktor ini tidak searah dengan teori *stewardship* yang menekankan bahwa pemerintah daerah mempunyai suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Meskipun Kekayaan Daerah menunjukkan tingginya penerimaan daerah, hal tersebut tidak langsung diikuti oleh peningkatan pengungkapan informasi finansial. Artinya, besarnya kekayaan atau sumber daya yang dimiliki daerah tidak selalu mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi dengan cara lebih transparan dalam LKPD. Dengan demikian, Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak sepenuhnya ditentukan oleh Kekayaan Daerah, tetapi juga oleh komitmen dan kesadaran akuntabilitas pemerintah daerah itu sendiri kepada para *stakeholders*. Hasil pelaksanaan penelitian ini searah dengan penelitian yang dilaksanakannya oleh Putri dan Arza (2019) yang menyatakan bahwa Kekayaan Pemerintah Daerah tidak mempunyai suatu pengaruh dihadapkan pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Hasil penelitian memberi petunjuk bahwasanya Kemandirian Daerah memiliki pengaruh bernilai negatif serta signifikan dihadapkan pada Tingkat Pengungkapan LKPD. Hubungan negatif ini memberikan indikasi bahwa daerah dengan tingkat Kemandirian Fiskal yang tinggi memiliki ketergantungan yang lebih rendah terhadap Transfer Dana dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini menyebabkan pengawasan dari pemerintah pusat jadi semakin melemah, sehingga dorongan bagi pemerintah daerah untuk menyusun serta melakukan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap dan transparan juga cenderung menurun. Faktor ini tidak searah dengan teori *stewardship*, yang mengungkap pemerintah daerah sebagai pihak yang dipercaya masyarakat akan senantiasa berupaya mempertanggungjawabkan

pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel (Donaldson & Davis, 1991). Tingkat kemandirian yang tinggi ternyata tidak diikuti dengan pengungkapan laporan keuangan yang optimal. Tingginya Kemandirian Daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri tanpa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. kondisi ini dapat menurunkan motivasi pemerintah daerah untuk menyusun dan mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap, karena pengawasan dari pemerintah pusat menjadi lebih lemah dan peluang untuk memanfaatkan sumber daya tanpa pengawasan yang ketat semakin besar (Salfadhilah dkk, 2021). Oleh karena itu, kemandirian fiskal yang tinggi, apabila tidak disertai dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan informasi keuangan yang disajikan kepada publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hasil pelaksanaan penelitian ini hampir serupa dengan penelitian yang dilaksanakannya oleh Finakesti dkk, (2022) yang mengungkap bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah mempengaruhi Pengungkapan dalam LKPD secara signifikan.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Dana Perimbangan justru semakin rendah Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan yang dilakukan pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi karena tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pusat mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah cenderung kurang bertanggung jawab dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara transparan. Tingginya ketergantungan juga dapat mengindikasikan lemahnya kemampuan fiskal daerah dalam mengelola keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan tidak optimal (Utami & Susilowati, 2017). Faktor ini tidak sejalan dengan teori *stewardship*, Tingkat Ketergantungan yang tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan yang optimal. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sering kali mencerminkan rendahnya kapasitas fiskal daerah, yang berdampak pada lemahnya komitmen pemerintah daerah untuk menyusun dan mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap dan transparan (Utami & Susilowati, 2017). Selain itu, tingginya ketergantungan dapat membuat pemerintah daerah menjadi pasif dan kurang inovatif dalam memperbaiki tata kelola keuangan, karena merasa selalu bergantung pada dana pusat. Oleh karena itu, dalam kondisi ketergantungan yang tinggi, jika tidak dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, justru dapat meningkatkan risiko penyimpangan informasi dalam laporan keuangan serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hasil penelitian ini hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafida dkk, (2019) yang menyatakan bahwa Tingkat Ketergantungan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Kemandirian Daerah dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwasanya Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Kemandirian Daerah dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera. Kondisi ini merefleksikan bahwasanya ketika keempat variabel independen tersebut dikelola secara optimal, seimbang dan berkesinambungan, maka dapat meningkatkan kualitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat secara signifikan. Hasil ini selaras dengan temuan Finakesti dkk, (2022), Salfadhilah dkk, (2021), Setiawan dan Maryono (2022) yang menyatakan bahwa faktor-faktor terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi Tingkat Pengungkapan LKPD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulannya dari penelitian ini secara parsial Ukuran Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh bernilai positif serta signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD. Kemandirian Daerah serta Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah mempunyai suatu pengaruh bernilai negatif terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD. Sedangkan Kekayaan Daerah tidak memberi pengaruh signifikan dihadapkan dengan Tingkat Pengungkapan LKPD. Secara simultan keselarasan Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Kemandirian Daerah serta Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah memberi pengaruh bernilai signifikan dihadapkan pada Tingkat Pengungkapan LKPD.

Saran yang dapat direkomendasikan untuk pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera adalah agar dapat memperhatikan keselarasan Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Kemandirian Daerah serta Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan Tingkat Pengungkapan LKPD yang lebih komprehensif, transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara dan Cheisviyanny. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, Vol. 2, No. 1 Seri B, 2162–2184.
- Astuti, Widaryanti, & dan Wahyuningsih. (2022). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Volume 01, No. 01.

- Finakesti, Aprianti, Yuliana, & dan Hartaty. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Volume 6, No. 1.*
- Kurniawati, Sarwono, & dan Sunarti. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 16 Edisi Khusus, 237–248.*
- Najah dan Purwati. (2019). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemda, Indeks Pembangunan Manusia dan Kualitas Hasil Audit terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 2, 70–88.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 106). Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Putri dan Arza. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 1, No. 3 Seri C, 1111–1130.*
- Rafida, Ridwan, Abdullah, & dan Yamin. (2019). Pengaruh Intergovernmental Revenue, Kekayaan Pemerintah Daerah dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif, Volume 1, Nomor 2, 63–70.*
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi, Vol. 2, No.1, 37–46.*
- Salfadhilah, Sumardjo, & dan Wijaya. (2021). Pengaruh Karakteristik Daerah dan Opini Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akunida ISSN, Volume 7, Nomor 1, 2442–3033.*
- Setiawan dan Maryono. (2022). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, Volume 4, No. 2.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 32 Ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Waliyyani dan Mahmud. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal, Volume 4, No. 2*, 1–8.

Wardani dan Ariani. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018/2020). *Seminar Nasional LPPM UMMAT, Volume 1*, 575–584. <https://e-ppid.bpk.go.id>. Diambil 17 Maret 2025